



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
PERHUBUNGAN DARAT

C-I-32

Surat Dari	: Direktur Prasarana Transportasi Jalan (Dispo Dirjen Hubdat)
Nomor Surat	: 3/DPTJ/I/2024
Tanggal Surat	: 2/1/24
Perihal	Permohonan Tanda Tangan Konsep perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Diterima Tanggal	: 10/01/24
Diterima Pukul	: 11:09 WIB
No Agenda	: C-I-32

☐	KSD 1	SUBDIREKTORAT TERMINAL ANGKUTAN JALAN
☐	KSD 2	SUBDIREKTORAT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
☐	KSD 3	SUBDIREKTORAT FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA
☐	KSD 4	SUBDIREKTORAT KEPENGUSAHAAN PRASARANA
☒	KTU	KASUBBAG TATA USAHA
☐		SEKRETARIS SATKER
☐		PARA PPK
☐		SESPRI

ISI DISPOSISI

☒ Tindak Lanjuti	☐ Untuk Diketahui
☐ Tanggapan/Saran	☐ Untuk Dipelajari & Laporkan
☐ Harap Mewakili	☐ Untuk Diselsaikan & Laporkan
☐ Hadir Bersama Saya	☒ Untuk Dilaksanakan & Laporkan
☐ Siapkan Bahan	☐ Untuk Dikoordinasikan
☐ Jadwalkan	☐ Untuk Disiapkan
☐ Hadiri	☐ Sangat Segera
☐ Segera	☐ Untuk Ditanggapi

CATATAN DISPOSISI DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

- TL sesuai kebutuhan
- Koordinasi & pantau progresnya. Th

Y
w/1



TONI TAULADAN, S.Si., M.T.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta (10110)



LEMBAR DISPOSISI

Yth. Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat		
Surat Diterima	Nomor agenda	N.12
	Diterima Tanggal	8 Januari 2024
	Pukul	09.15 WIB
	Dari	Dir Prasarana Transportasi Jalan
	Nomor surat	3/DPTJ/I/2024
	Tanggal	2 Januari 2024
	Perihal	Permohonan Tanda Tangan Konsep Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Diteruskan kepada Yth.		
1. ☐ SESDITJEN 2. ☐ DIR. LALULINTAS JALAN 3. ☐ DIR. ANGKUTAN JALAN 4. ☒ DIR. PRASARANA TRANSPORTASI JALAN 5. ☐ DIR. SARANA TRANSPORTASI JALAN 6. ☐ DIR. TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN 7. ☐ SPRI 8. ☐ ADC		
Isi Disposisi		
1. ☐ Tindak Lanjuti 2. ☐ Tanggapan /Saran 3. ☐ Harap Mewakili 4. ☐ Hadir Bersama Saya 5. ☐ Siapkan Bahan 6. ☐ Jadwalkan	1. ☐ Untuk Diketahui 2. ☐ Untuk Dipelajari dan Laporkan 3. ☐ Untuk Diselesaikan dan Laporkan 4. ☐ Untuk Dilaksanakan dan Laporkan 5. ☐ Untuk Dikoordinasikan 6. ☐ Untuk Diarsipkan	
Catatan :		
 Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M		



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA, 10110

Telp. (021) 3506138,
3506129, 3506145
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3862178
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page: <http://hubdat.dephub.go.id>

NOTA DINAS

Nomor 3/DPTJ/I/2024

Yth : Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Dari : Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Hal : Permohonan Tanda Tangan Konsep Perjanjian Kinerja
(PK) Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi
Jalan
Tanggal : 2 Januari 2024

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : UM.207/84/17/DJPD/2023 tanggal 9 November 2023 perihal Undangan Persiapan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bersama ini terlampir kami sampaikan konsep Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

Toni Tauladan, S.Si., M.T.
NIP. 197009101997031002



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

PERJANJIAN KINERJA

2024



PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	M. Alhafiq Wahyu Nabillah, S.T.	Ahli Pertama - Pengendali Dampak Lingkungan, Seksi Rancang Bangun Terminal	2/24 1	
2.	Diperiksa	Susiani,A.Md LLAJ, S.T., M.T.	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	2/24 1	
3.	Diperiksa	Y Prihantoko, S.T., M.Sc.	Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	2/24 1	



PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Syifa Azzaria, S.Stat	Ahli Pertama - Statistisi, Seksi Rancang Bangun PKB	3/1 24	
2.	Diperiksa	Dluha My Praba, M.T.	Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	3/1 24	
3.	Diperiksa	Ayu Nilawati Agustina, SE., M.MTr.	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	3/1 24	
4.	Disetujui	Eriza Putra, S.Si, M.M.	Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	3/1 24	



PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Danny Muhammad Muflih, A.Md LLAJ, S.Tr.Tra	Penyusun Bahan Usaha, Seksi Pengawasan dan Evaluasi	2/1 24	
2.	Diperiksa	Diana Septi Rahayu, S.E., M.T.	Ketua Tim Kelompok Substansi Penyelenggaraan Kemitraan, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	2/1 24	
3.	Diperiksa	Rizki Fauzi Rahman, S.SiT, M.Si.	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengawasan dan Evaluasi, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	2/1 24	
4.	Disetujui	Susanty Pertiwi	Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	2/1 24	



PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

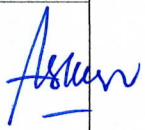
No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Riska Mahanani Pratiwi, A.Md LLAJ, S.T.	Penyusun Data Kepegawaian	2/1 24	
2.	Diperiksa	Sudarmaji, S.A.P., M.M.	Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	2/1 24	
3.	Disetujui	Toni Tauladan, S.Si., M.T.	Direktur Prasarana Transportasi Jalan	3/1.24	



PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Dwiki Adhitya, S.ST.	Penyusun Rencana dan Program, Seksi Integrasi Moda	2/1 24	
2.	Diperiksa	Jekky Hendri, S.Sos	Ketua Tim Kelompok Substansi Integrasi Moda, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	2/1 24	
3.	Diperiksa	Astri Widiani, A.Md LLAJ, S.E.	Ketua Tim Kelompok Substansi Fasilitas Pendukung, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	2/1 24	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toni Tauladan, S.Si., M.T.

Jabatan : Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 03 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Pihak Pertama
Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,64
		IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	111
		IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	13
2	SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,50
		IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,75
		IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	81,75
3	SK.3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	24,0
4	SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89
5	SK.1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74

Kegiatan

1. Pelayanan transportasi darat
2. Penunjang teknis transportasi darat
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat

Anggaran

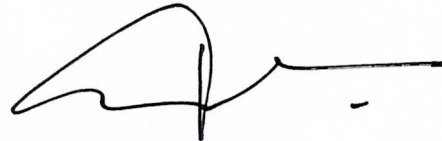
Rp. 38.406.000.000,00
Rp. 38.674.313.000,00
Rp. 22.877.088.000,00

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, 03 Januari 2024
Direktur Prasarana Transportasi Jalan



TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

Lampiran I Nota Dinas Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Nomor : 3/DPTJ/I/2024
Tanggal : 03 Januari 2024

Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sehubungan dengan adanya DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Nomor: DIPA-022.03.1.352597/2024 tanggal 24 November 2023 dan perubahan target Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2024 maka perlu ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Program yang akan digunakan untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah Program Infrastruktur Konektivitas dengan pagu awal sebesar Rp77.080.313.000,00 dan Program Dukungan Manajemen masih dengan pagu sebesar Rp22.877.088.000,00.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SK.1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	0,64	Rasio	1. Subdit TAJ 2. Subdit Faspim
		IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	111	Lokasi	Subdit TAJ
		IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	13	Lokasi	Subdit Faspim
2	SK.2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	81,50	%	Subdit TAJ
		IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	53,75	%	Subdit TAJ
		IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	81,75	%	Subdit TAJ
3	SK.3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	24,0	%	Subdit PKB
4	SK.5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	89	Nilai	1. Subdit TAJ 2. Subdit PKB 3. Subdit Faspim 4. Subdit KP 5. Subbag Tata Usaha
5	SK.1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	74	Nilai	Subbag Tata Usaha

Lampiran III Nota Dinas Direktur Prasarana Transportasi Jalan
 Nomor : 3/DPTJ/I/2024
 Tanggal : 03 Januari 2024

**TABEL SEMULA MENJADI
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target (2023)	Realisasi (2023)	Target Renstra 2024	Target 2024	Keterangan
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,62	0,64	0,70	0,64	Target Meningkat
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	105	108	114	111	Target Meningkat
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	12	12	25	13	Target Meningkat
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	%	81	94,61	81.50	81,50	Target Meningkat
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53.7	60,56	53,75	53,75	Target Meningkat
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78.6	81,75	83.38	81,75	Target Meningkat
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25	24,9	20,0	24,0	Target Meningkat

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target (2023)	Realisasi (2023)	Target Renstra 2024	Target 2024	Keterangan
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88	88	89	89	Target Meningkat
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	73	73,44	74	74	Target Meningkat

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SK. 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan DEFINISI : IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan adalah perbandingan jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Prioritas yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan terhadap jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Prioritas yang direncanakan untuk diakomodir dan dilayani prasarana transportasi jalan. Jumlah KSN Prioritas yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan adalah jumlah KSN Prioritas yang di dalam wilayah administrasinya (kabupaten/kota) terdapat prasarana transportasi jalan yang beroperasi. Simpul prasarana transportasi jalan adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda transportasi jalan yang berupa terminal tipe A, terminal barang serta fasilitas pendukung dan integrasi moda yang berupa halte. Kawasan Strategis Nasional (KSN) prioritas yang direncanakan untuk dilayani prasarana transportasi jalan meliputi 10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN dengan total 69 wilayah KSN.	Rasio	0,64	TERMINAL ANGKUTAN JALAN: 1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan. FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA: Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;	1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun	1. Subdit TAJ 2. Subdit Faspim

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi DEFINISI: Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi adalah jumlah terminal tipe A dan terminal barang di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang telah memberikan pelayanan berupa adanya aktivitas kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, naik-turun penumpang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. Terminal tipe A dan terminal barang kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah terminal tipe A dan terminal barang yang telah ditetapkan lokasinya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan dan telah diserahkan dari Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.	Lokasi	111	TERMINAL ANGKUTAN JALAN : Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan.	1.0 Tahun	Subdit TAJ
		IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda DEFINISI: Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 serta PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan. Fasilitas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat.	Lokasi	13	FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA: Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.	1.0 Tahun	Subdit Faspim

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	SK. 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A DEFINISI: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A merupakan rekapitulasi hasil Survey Koresponden pada Terminal Penumpang Tipe A melalui aplikasi Case Management System IKM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pengisian survey dilakukan secara periodik setiap bulan oleh penumpang yang diarahkan oleh Petugas Terminal di seluruh Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi di bawah kerwenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dapat diakses melalui barcode ataupun link survey yang berbeda-beda setiap terminalnya. Barcode untuk mengakses form survey disediakan oleh masing-masing Terminal Tipe A dengan cara di-display melalui poster dan/atau banner ataupun melalui link yang diberikan oleh petugas terminal kepada penumpang di terminal serta disebarakan melalui media sosial masing-masing terminal. Pengisian survey dilakukan dengan cara mengisi data diri dan menjawab pertanyaan terkait dengan pelayanan di terminal dengan memberikan rating dari 1 sampai 6, dengan rating 6 berarti paling memuaskan dan rating 1 paling tidak memuaskan. Rekapitulasi hasil survey seluruh Terminal Tipe A dapat diakses melalui link skm.dephub.go.id dengan cara memasukkan username dan password yang telah terdaftar sebagai admin.	%	81,50	TERMINAL ANGKUTAN JALAN : Survei Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A (Inventarisasi melalui aplikasi Case Management System IKM)	1.0 Tahun	Subdit TAJ
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A DEFINISI: IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Penumpang Tipe A adalah rata-rata	%	53,75	TERMINAL ANGKUTAN JALAN: 1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan;	1.0 Tahun	Subdit TAJ

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dari persentase pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal pada Terminal Penumpang Tipe A beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A didapatkan dari hasil survei penilaian pemenuhan jenis pelayanan yang diberikan nilai berdasarkan indikatornya dibandingkan dengan nilai maksimal yang bisa didapatkan jika semua jenis pelayanan terpenuhi indikatornya. Berdasarkan Permenhub Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Standar Pelayanan Terminal Penumpang Tipe-A mencakup: (1) Pelayanan Keselamatan dengan bobot nilai 20%; (2) Pelayanan Keamanan dengan bobot nilai 6%; (3) Pelayanan Keandalan/Keteraturan dengan bobot nilai 18%; (4) Pelayanan Kenyamanan dengan bobot nilai 36%; (5) Pelayanan Kemudahan/Keterjangkauan dengan bobot nilai 18%; (6) Pelayanan Kesetaraan dengan bobot nilai 2%. Survei pemenuhan Standar Penyelenggaraan Terminal pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A dilakukan secara online dengan menyebar kuisioner google form ke seluruh Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pengisian kuisioner dilakukan dengan menjawab pertanyaan terkait jenis-jenis pelayanan sesuai dengan kondisi di terminal masing-masing. Rekapitulasi hasil pengisian kuisioner seluruh Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dilihat di akun google drive yang digunakan untuk membuat form kuesioner.			2. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal.	1.0 Tahun 76.0 Unit	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A DEFINISI : IKK Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A adalah presentase penerapan digitalisasi di Terminal Penumpang Tipe A yang meliputi : 1. Presentase terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System dengan bobot 74%; 2. Presentase terminal yang dipasang mesin check in tiket dan passenger gate dengan bobot 8,4%; 3. Presentase terminal yang dipasang vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV dengan bobot 17,6%. Bobot nilai ditentukan berdasarkan fokus tujuan pada pelaporan data produksi secara online melalui system. Langkah tersebut merupakan langkah step by step menuju terminal yang smart melalui digitalisasi terminal. Latar belakang yang mendasari rumusan IKK tersebut yaitu karena terdapat perubahan pelaporan data produksi terminal yang semula dilaporkan secara manual kemudian direkap oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berubah menjadi input melalui sistem online sehingga sebagai tahap awal digitalisasi perencanaan 5 tahun melalui Rensta 2020 s.d. 2024 mengutamakan Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia untuk melaporkan data produksi secara online sehingga presentase terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System berkontribusi paling besar yaitu dengan bobot 74%. SIASATI dapat diakses melalui https://siasati.dephub.go.id/. Selanjutnya dalam rangka menuju terminal yang smart Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merencanakan akan mengaplikasikan digitalisasi terminal dengan memasang alat yang dapat mengirimkan data Terminal secara realtime yaitu mesin check in tiket, passenger gate, vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV. Akan tetapi karena besarnya jumlah Terminal	%	81,75	TERMINAL ANGKUTAN JALAN : 1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan.	1.0 Tahun 1.0 Tahun	Subdit TAJ

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia, sehingga pengaplikasian alat-alat tersebut dilakukan secara bertahap, sehingga dalam indikator kinerja diberikan bobot penilaian sebesar 8,4% dan 17,6%. Vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV memiliki bobot yang lebih besar dikarenakan merupakan cerminan dari terminal data produksi Terminal yaitu kendaraan angkutan umum yang keluar masuk Terminal Presentase-presentase di atas didapatkan dari data jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang memenuhi masing-masing kriteria dibandingkan dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi dalam kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dikarenakan pada saat ini Terminal Penumpang Tipe A di Indonesia berada dalam kewenangan BPTJ (Pemerintah Pusat) untuk Terminal Penumpang Tipe A di wilayah Bodetabek, kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk Terminal Penumpang Tipe A di wilayah DKI Jakarta, kewenangan swasta dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk Terminal Penumpang Tipe A yang tidak diserahkan ke pemerintah pusat.					
3	SK. 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat DEFINISI: Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat merupakan perbandingan jumlah angkutan barang yang melanggar di UPPKB terhadap jumlah angkutan barang yang masuk ke UPPKB. Berdasarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, pasal 5 ayat (2) menyatakan jenis pelanggaran angkutan barang di UPPKB meliputi: - tata cara pemuatan barang; - dimensi kendaraan Angkutan Barang; - tekanan seluruh sumbu dari/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;	%	24,0	PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR : - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 1.0 Tahun - Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 1.0 Tahun - Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 1.0 Tahun - Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan 1.0 Tahun		Subdit PKB

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				d. dokumen Angkutan Barang; e. kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan f. jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.			dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 6. Pemeliharaan perangkat WDIM di Balonggandu; 7. Pemeliharaan perangkat WDIM di Kulwaru; 8. Pemeliharaan perangkat WDIM di Losarang; 9. Pemeliharaan dan Peneraan ulang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel di Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.	1.0 Paket 2.0 Lajur 1.0 Lajur 1.0 Lajur 3.0 Lajur	
4	SK. 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat DEFINISI: Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari: a) Aspek Perencanaan; b) Aspek Kepegawaian (SDM); c) Aspek Keuangan; Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance. Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin. Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja.	Nilai	89	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana; 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;	18.0 Rekomendasi Kebijakan 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun	1. Subdit TAJ 2. Subdit PKB 3. Subdit Faspim 4. Subdit KP 5. Subbag Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							8. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan;	1.0 Tahun	
							9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan;	1.0 Tahun	
							10. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta;	1.0 Tahun	
							11. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ;	1.0 Tahun	
							12. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan;	1.0 Tahun	
							13. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri;	1.0 Tahun	
							14. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi;	1.0 Tahun	
							15. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025;	1.0 Tahun	
							16. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan;	1.0 Tahun	
							17. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	1.0 Tahun	
							18. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal	1.0 Tahun	

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area; 19. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait; 20. <i>Inhouse Consultant</i> Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 21. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional); 22. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional); 23. Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Transit System dan ITS IKN; 24. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025.	1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Kajian 1.0 Kajian 3.0 Rekomendasi Kebijakan 1.0 Paket	
5	SK. 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan DEFINISI: 1. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, sebagaimana dijelaskan yaitu dalam melaksanakan pembinaan dan pemberian	Nilai	74	TATA USAHA : Layanan Perkantoran.	1.0 Layanan	Subbag Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dukungan urusan, ketatausahaan, kerumatanggaan, serta penyiapan perencanaan dan keuangan. 2. Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang bertempat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada stakeholders (Pimpinan dan pegawai) di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai implikasi dari tugas dan fungsi yang diampu Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.					



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB		
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,64	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan.	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	865.307.000	Subdit TAJ Subdit Faspim	
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	111	Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan.	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	500.000.000	Subdit TAJ
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	13	1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 2. Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	432.896.000	Subdit Faspim
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	(%)	81,50	Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A.	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	-	Subdit TAJ	
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	(%)	53,75	1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal.	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	38.860.346.000	Subdit TAJ	
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	(%)	81,75	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan.	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	507.638.000	Subdit TAJ	
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	(%)	24,0	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 6. Pemeliharaan perangkat WDIM di Balonggandu; 7. Pemeliharaan perangkat WDIM di Kulwaru; 8. Pemeliharaan perangkat WDIM di Losarang; 9. Pemeliharaan dan Pemasaran ulang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel di Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	15.455.892.000	Subdit PKB
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana; 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 8. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjakasamakan; 9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyediaan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan; 10. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 11. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ; 12. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 13. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; 14. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi; 15. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025. 16. Penyusunan Peraturan Penundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 17. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 18. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area; 19. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait; 20. Inhouse Konsultan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 21. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional) 22. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional) 23. Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Transit System dan ITS IKN; 24. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025.	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	37.044.234.000	Subdit TAJ Subdit PKB Subdit Faspim Subdit KP Subbag Tata Usaha
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana	Nilai	74	1. Layanan Perkantoran	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	6.291.088.000	Subbag Tata Usaha		

Jakarta, 3 Januari 2024

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002